



## Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Disiplin Seragam Dan Kehadiran Siswa di SMP Annur

(Tinjauan Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi Anak)

Agung Muhamad Bisri<sup>1</sup>, Ifan Afandy<sup>2</sup>, Ahmad Syarifuddin<sup>3</sup>, Wahyu Divangga Tirta<sup>4</sup>

Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [agungbisri41@gmail.com](mailto:agungbisri41@gmail.com), [abuhananak@gmail.com](mailto:abuhananak@gmail.com), [syafinari02@gmail.com](mailto:syafinari02@gmail.com), [divanggawahyu@gmail.com](mailto:divanggawahyu@gmail.com)

Article received: 03 November 2025, Review process: 10 Januari 2026,

Article Accepted: 23 Januari 2026, Article published: 02 Februari 2026

### ABSTRACT

The implementation of school regulations in a pesantren-based educational context requires an approach that is grounded in legal legitimacy while remaining sensitive to students' psychological development in fostering sustainable discipline. This study aims to analyze the enforcement of school rules regarding uniform compliance and student attendance at SMP Annur from the perspectives of educational law and child psychology. The research employs a qualitative case study design using in-depth interviews, observations, and document analysis to identify forms of violations, patterns of rule enforcement, and students' responses. The findings indicate that the school regulations possess a clear legal-formal foundation and an educative orientation; however, their implementation remains inconsistent, as violations related to uniform use and truancy are influenced by students' boarding school backgrounds, variations in teachers' disciplinary approaches, and peer influence. The implications emphasize the necessity of integrating legal certainty with persuasive and dialogical psychological approaches, as well as strengthening collaboration between the school and the pesantren, to cultivate a humane, consistent, and sustainable culture of student discipline.

**Keywords:** School Rules, Uniform Discipline, Student Attendance, Child Psychology.

### ABSTRAK

Penerapan tata tertib sekolah dalam konteks pendidikan berbasis pesantren menuntut pendekatan yang tidak hanya berlandaskan legitimasi hukum, tetapi juga sensitif terhadap perkembangan psikologis peserta didik dalam membangun disiplin yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan tata tertib sekolah terhadap disiplin seragam dan kehadiran siswa di SMP Annur ditinjau dari perspektif hukum pendidikan dan psikologi anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran, pola penegakan aturan, serta respons peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata tertib sekolah telah memiliki dasar legal-formal yang jelas dan bersifat edukatif, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten, sehingga pelanggaran seragam dan perilaku bolos masih dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan santri, perbedaan pola pembinaan pendidik, dan pengaruh teman sebaya. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip kepastian hukum dengan pendekatan persuasif dan dialogis berbasis psikologi anak, serta penguatan sinergi antara sekolah dan pesantren, guna membentuk budaya disiplin siswa yang manusiawi, konsisten, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tata Tertib Sekolah, Disiplin Seragam, Kehadiran Siswa, Psikologi Anak

## PENDAHULUAN

Penerapan tata tertib sekolah merupakan salah satu instrumen strategis dalam membentuk kedisiplinan peserta didik dan menjaga keteraturan proses pembelajaran. Tata tertib tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang menanamkan nilai tanggung jawab, kepatuhan, dan kesadaran hukum sejak dini. Dalam praktiknya, efektivitas tata tertib sangat ditentukan oleh kesesuaian antara aturan yang ditetapkan dengan kondisi sosial, psikologis, dan kultural peserta didik. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berulang dan melemahkan fungsi disiplin di lingkungan sekolah.

SMP Annur memiliki karakteristik khas sebagai sekolah yang seluruh peserta didiknya merupakan santri pondok pesantren. Sistem pendidikan terpadu antara pendidikan formal dan kepesantrenan membentuk pola kehidupan siswa yang berbeda dengan sekolah umum. Pola berpakaian santri yang relatif fleksibel di lingkungan pesantren serta padatnya aktivitas nonformal diduga memengaruhi persepsi peserta didik terhadap kewajiban mengenakan seragam sekolah dan kehadiran dalam pembelajaran formal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan perilaku bolos sekolah, meskipun sekolah telah memiliki tata tertib tertulis yang mengacu pada kebijakan pendidikan nasional. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang ditetapkan dengan praktik kedisiplinan peserta didik di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan tata tertib sekolah yang konsisten berpengaruh signifikan terhadap pembentukan disiplin siswa. Ketegasan dan konsistensi pendidik dalam menegakkan aturan sekolah menjadi faktor kunci dalam menekan pelanggaran disiplin siswa (Dewi et al., 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa pendekatan disiplin yang mempertimbangkan aspek psikologis anak, seperti komunikasi persuasif dan pembinaan personal, lebih efektif dibandingkan pendekatan sanksi semata (Nugraha et al., 2024). Sementara itu, perilaku bolos sekolah dipengaruhi oleh faktor psikososial, kelelahan, dan lingkungan pergaulan sebaya (Alalak et al., 2022). Dalam konteks pendidikan berbasis pesantren, menyatakan bahwa perbedaan budaya disiplin antara lingkungan pesantren dan sekolah formal dapat memengaruhi kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah (Bibiana et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan tata tertib sekolah dan perilaku disiplin siswa, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum pendidikan dan psikologi anak pada konteks sekolah berbasis pesantren masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek manajerial atau psikologis secara terpisah, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana legitimasi hukum tata tertib sekolah dan pendekatan psikologis anak dapat saling melengkapi dalam menanggulangi ketidakdisiplinan. Selain itu, kajian empiris mengenai ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan perilaku bolos sekolah pada sekolah dengan latar belakang santri pondok pesantren masih jarang dilakukan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata tertib sekolah di SMP Annur terkait ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan bolos sekolah ditinjau dari perspektif hukum pendidikan

dan psikologi anak. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi, mengkaji upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, serta menganalisis efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam membangun disiplin peserta didik secara berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan tata tertib sekolah terkait ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan perilaku bolos sekolah di SMP Annur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena kedisiplinan peserta didik secara kontekstual dan komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan latar belakang peserta didik sebagai santri pondok pesantren yang menjalani sistem pendidikan terpadu antara pendidikan formal dan kepesantrenan. Penelitian dilaksanakan di SMP Annur dengan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka dalam perumusan, penerapan, serta pengalaman terhadap tata tertib sekolah. Kepala sekolah dan guru dipilih karena berperan dalam penegakan aturan, sedangkan peserta didik dipilih untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan pengalaman mereka terhadap aturan pemakaian seragam dan kehadiran sekolah. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi sekolah, seperti buku tata tertib dan catatan pelanggaran siswa. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan informan mengenai bentuk pelanggaran dan upaya penanganannya, observasi langsung untuk mengamati perilaku kedisiplinan siswa dalam kegiatan sekolah sehari-hari, serta studi dokumentasi untuk menelaah kebijakan dan data pelanggaran tata tertib. Kehadiran peneliti bersifat partisipatif terbatas, yaitu sebagai pengamat tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran utuh mengenai penerapan tata tertib sekolah di SMP Annur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional, meliputi hak dan kewajiban warga negara dalam memperoleh pendidikan, standar mutu pendidikan, pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan, hak dan kewajiban pendidik serta peserta didik, pendanaan, hingga aspek keamanan dan disiplin sekolah. Tujuan utama hukum pendidikan adalah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Di Indonesia, landasan utama hukum pendidikan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental

setiap warga negara dan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya secara sistematis dan berkeadilan. Regulasi tersebut diperkuat dengan berbagai peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang mengatur pelaksanaan teknis pendidikan di satuan pendidikan.

Aspek utama hukum pendidikan mencakup hak atas pendidikan, standar nasional pendidikan, manajemen dan tata kelola lembaga pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik serta pendidik, penyelenggaraan pendidikan khusus, serta perlindungan terhadap keamanan dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan sekolah. Dengan demikian, hukum pendidikan berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan legitimasi bagi sekolah dalam menyusun dan menegakkan tata tertib peserta didik secara sah, proporsional, dan tidak bertentangan dengan hak dasar anak (Hukum, 2021).

Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkaji perilaku dan perkembangan individu dalam konteks pendidikan. Ilmu ini berfokus pada aspek kognitif, emosional, dan sosial peserta didik untuk memahami proses belajar mengajar, mengoptimalkan pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Melalui psikologi pendidikan, pendidik dapat memahami perbedaan karakteristik peserta didik, memilih strategi pembelajaran yang tepat, serta mengembangkan metode evaluasi yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa.

Ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi :

- a. proses belajar mengajar : Memahami cara individu belajar dan bagaimana proses tersebut bisa dioptimalkan.
- b. perkembangan peserta didik : Mengkaji perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan fisik siswa.
- c. strategi pembelajaran : Merancang metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.
- d. evaluasi dan asesmen : Mengembangkan alat ukur untuk menilai pemahaman dan kemajuan siswa.
- e. serta bimbingan dan konseling : Memberikan pendekatan emosional dan penyelesaian masalah bagi siswa.

Penerapan psikologi pendidikan memberikan manfaat :

- a. Bagi guru  
Dalam memahami perbedaan individu siswa, menciptakan suasana kelas yang kondusif, memotivasi siswa, serta memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.
- b. Bagi siswa  
psikologi pendidikan membantu pengembangan potensi diri dan kemampuan mengatasi permasalahan belajar, sedangkan bagi sistem pendidikan, ilmu ini berkontribusi dalam membangun proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien (Linda et al., 2024) (Khozin & Hidayatullah, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata tertib sekolah di SMP Annur telah disusun secara formal berdasarkan kebijakan internal sekolah yang mengacu pada peraturan pendidikan nasional. Berdasarkan hasil telaah dokumen, tata tertib tersebut mengatur kewajiban peserta didik, khususnya terkait pemakaian seragam sekolah dan kehadiran dalam kegiatan pembelajaran.

Namun, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan guru serta wali kelas menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib masih sering terjadi, terutama pada aspek pemakaian seragam dan kehadiran siswa. Pelanggaran pemakaian seragam meliputi penggunaan seragam yang tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, serta penggunaan pakaian pondok pesantren pada jam sekolah formal. Sementara itu, pelanggaran kehadiran berupa perilaku bolos sekolah pada jam pelajaran tertentu.

Hasil wawancara dengan guru mengungkapkan bahwa kebiasaan berpakaian di lingkungan pondok pesantren yang relatif fleksibel memengaruhi kepatuhan siswa terhadap aturan seragam sekolah. Selain itu, sebagian siswa memandang aturan seragam sekolah kurang penting dibandingkan aturan pondok. Temuan ini menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan santri memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku disiplin siswa di sekolah formal.

**Tabel 1. Rekapitulasi Bentuk Pelanggaran  
Tata Tertib Siswa SMP Annur**

No	Nama	Kelas	Jenis Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran	Keterangan
1	Ulva Azizatul Nur H	VIII	Seragam Sekolah	Tidak Sesuai	Dikarenakan Hilang
2	Fatih Ramadhan	IX	Seragam Sekolah	Tidak Sesuai	Dikarenakan Hilang
3	Nurmaina	VIII	Seragam Sekolah	Tidak Sesuai	Dikarenakan Hilang
4	Rizchy Fahreza Seftyen	IX	Kehadiran	Bolos Sekolah	pengaruh teman
5	Huga Fun De Lucky	IX	Kehadiran	Bolos Sekolah	pengaruh teman
6	Hafizah Ayu Novianti	IX	Kehadiran	Bolos Sekolah	pengaruh teman

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku bolos sekolah masih terjadi, khususnya pada jam pelajaran tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, perilaku bolos dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kelelahan fisik akibat aktivitas pondok pesantren yang padat, rendahnya motivasi mengikuti pembelajaran formal, serta pengaruh teman sebaya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor psikososial dan lingkungan pergaulan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku bolos siswa (Bibiana et al., 2025)(Alalak et al., 2022).



Dari perspektif hukum pendidikan, penerapan tata tertib di SMP Annur telah memenuhi prinsip legalitas dan tidak bertentangan dengan hak dasar peserta didik. Sanksi yang diterapkan bersifat bertahap dan edukatif, seperti teguran lisan, pembinaan personal, dan pemanggilan siswa. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsistensi antar pendidik dalam menegakkan aturan. Inkonsistensi tersebut berdampak pada rendahnya efek jera dan berulangnya pelanggaran tata tertib. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa inkonsistensi penegakan aturan dapat melemahkan efektivitas disiplin siswa (Riset et al., 2024).

Dari perspektif psikologi anak, pendekatan persuasif, dialogis, dan komunikatif yang diterapkan oleh sebagian guru terbukti lebih efektif dalam mengurangi pelanggaran tata tertib. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa lebih mudah menerima aturan ketika diberikan penjelasan rasional dan dikaitkan dengan tanggung jawab mereka sebagai santri dan pelajar. Pendekatan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa disiplin yang dibangun melalui kesadaran internal lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan sanksi semata (Sma et al., 2023) (Nugraha et al., 2024).



*Gambar 1. Penanganan Tata Tertib Sekolah terhadap Disiplin Seragam dan Kehadiran Siswa*

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan perilaku bolos sekolah di SMP Annur dipengaruhi oleh latar belakang peserta didik sebagai santri pondok pesantren serta konsistensi penerapan tata tertib oleh pendidik. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip hukum pendidikan dan pendekatan psikologi anak menjadi kebutuhan mendesak agar penerapan tata tertib sekolah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penanggulangan ketidakdisiplinan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis melalui sosialisasi rutin tata tertib, penyamaan persepsi antar pendidik, serta pendekatan persuasif yang menekankan nilai tanggung jawab dan keteladanan. Selain itu, koordinasi antara pihak sekolah dan pengelola pondok pesantren menjadi penting untuk menyelaraskan aktivitas santri dan mencegah perilaku bolos sekolah.

Implikasi kebijakan selanjutnya berkaitan dengan perlunya standarisasi tata tertib berbasis nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan prinsip *tarbiyah* dan *ta'dib*. Kepemimpinan sekolah dan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun budaya disiplin yang konsisten dan berkelanjutan melalui keteladanan dan kebijakan yang visioner.

Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data perlu dilakukan agar penerapan tata tertib menjadi bagian dari siklus manajemen mutu pendidikan pesantren. Integrasi nilai disiplin ke dalam kurikulum dan kegiatan keseharian santri juga penting agar pembentukan karakter disiplin berlangsung secara holistik dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor krusial yang memengaruhi efektivitas penerapan tata tertib sekolah di SMP Annur adalah konsistensi penegakan aturan oleh pendidik dan pihak sekolah. Meskipun tata tertib telah disusun secara formal dan mengacu pada ketentuan hukum pendidikan nasional, pelaksanaannya di lapangan masih menunjukkan variasi antar pendidik. Perbedaan sikap guru dalam menanggapi pelanggaran seragam dan kehadiran siswa menyebabkan siswa memiliki persepsi yang tidak seragam terhadap tingkat keseriusan aturan tersebut.

Dalam perspektif hukum pendidikan, konsistensi merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Aturan yang ditegakkan secara tidak konsisten berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menimbulkan ketidakadilan perlakuan terhadap peserta didik. Ketika satu pelanggaran diberi sanksi tegas oleh guru tertentu, sementara pelanggaran serupa diabaikan oleh guru lain, peserta didik cenderung menilai tata tertib sebagai aturan yang fleksibel dan dapat ditawar. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya frekuensi pelanggaran yang berulang.

Dari sudut pandang psikologi anak, inkonsistensi penegakan aturan dapat menghambat proses internalisasi nilai disiplin. Anak usia SMP berada pada tahap perkembangan di mana struktur, keteladanan, dan kejelasan aturan sangat dibutuhkan. Ketidakkonsistenan justru menimbulkan kebingungan, resistensi, dan sikap permisif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, konsistensi bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga kebutuhan psikologis peserta didik dalam membangun kontrol diri dan tanggung jawab.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang peserta didik sebagai santri pondok pesantren memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi dan perilaku disiplin di sekolah formal. Budaya pesantren yang menekankan kepatuhan kepada kiai, fleksibilitas berpakaian, serta padatnya aktivitas keagamaan membentuk kebiasaan yang berbeda dengan sistem sekolah formal. Perbedaan ini seringkali memunculkan konflik norma, khususnya terkait pemakaian seragam dan ketepatan waktu kehadiran di kelas.

Dalam konteks hukum pendidikan, sekolah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata tertib sebagai bagian dari manajemen satuan pendidikan. Namun, efektivitas aturan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan kondisi sosiokultural peserta didik. Ketika aturan sekolah tidak disinergikan dengan budaya pesantren, peserta didik cenderung mengalami disonansi nilai yang berdampak pada rendahnya kepatuhan.

Pendekatan psikologi anak menekankan pentingnya adaptasi lingkungan pendidikan terhadap latar belakang peserta didik. Disiplin yang efektif bukanlah disiplin yang bersifat memaksa, melainkan disiplin yang dipahami dan diterima secara sadar. Oleh karena itu, penyelarasan nilai disiplin sekolah dengan nilai kepesantrenan menjadi strategi penting agar peserta didik tidak memandang aturan sekolah sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari pembentukan karakter santri yang utuh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk sanksi yang diterapkan di SMP Annur cenderung bersifat edukatif, seperti teguran, pembinaan personal, dan pemanggilan siswa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum pendidikan yang melarang pemberian hukuman fisik dan tindakan yang merendahkan martabat peserta didik. Namun, efektivitas sanksi tersebut sangat bergantung pada cara penyampaian dan keberlanjutannya.

Dari perspektif psikologi anak, sanksi yang disertai penjelasan rasional dan dialog terbuka lebih mudah diterima oleh peserta didik. Wawancara menunjukkan bahwa siswa lebih memahami kesalahan mereka ketika guru mengaitkan pelanggaran dengan konsekuensi akademik, tanggung jawab sebagai santri, dan nilai moral. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kesadaran internal, bukan sekadar takut terhadap hukuman.

Sebaliknya, sanksi yang diberikan tanpa penjelasan cenderung hanya menghasilkan kepatuhan semu dan bersifat sementara. Oleh karena itu, penguatan pendekatan edukatif perlu dilakukan secara sistematis agar sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran karakter disiplin. Temuan penelitian menegaskan bahwa pembinaan disiplin siswa di SMP Annur tidak dapat dilepaskan dari peran pondok pesantren sebagai lingkungan utama peserta didik. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan pengelola pesantren berpotensi memperlemah upaya penegakan tata tertib, khususnya terkait kehadiran siswa. Aktivitas pesantren yang padat seringkali menjadi alasan keterlambatan atau ketidakhadiran siswa di sekolah formal.

Dalam perspektif hukum pendidikan, sinergi antar lembaga pendidikan formal dan nonformal merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjamin hak anak atas pendidikan. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi anak, lingkungan yang selaras dan saling mendukung akan menciptakan rasa aman



dan kejelasan peran bagi peserta didik. Ketika sekolah dan pesantren menyampaikan pesan disiplin yang sama, peserta didik lebih mudah menginternalisasi nilai tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara pihak sekolah dan pesantren dalam menyusun kebijakan disiplin yang terpadu. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan budaya disiplin yang konsisten, manusiawi, dan berkelanjutan bagi peserta didik.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakdisiplinan pemakaian seragam dan perilaku bolos sekolah di SMP Annur masih terjadi meskipun tata tertib sekolah telah memiliki dasar legal formal yang jelas. Pelanggaran seragam dipengaruhi oleh kebiasaan berpakaian peserta didik sebagai anak pondok pesantren, sedangkan perilaku bolos sekolah dipengaruhi oleh kelelahan aktivitas pondok, rendahnya motivasi belajar, dan pengaruh teman sebaya. Penerapan tata tertib sekolah telah berorientasi pada pembinaan sesuai prinsip hukum pendidikan, namun belum optimal akibat perbedaan konsistensi penegakan aturan antar pendidik. Dari perspektif psikologi anak, pendekatan persuasif dan edukatif lebih efektif dibandingkan sanksi semata. Oleh karena itu, integrasi penegakan tata tertib yang konsisten dengan pendekatan psikologi anak diperlukan untuk membentuk disiplin seragam dan kehadiran siswa secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMP An-Nur Bululawang yang telah memberikan izin dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para guru, peserta didik, serta pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan kelancaran penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam proses publikasi artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alalak, N., Syifa, H., & Prasetya, M. E. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 5518–5526.
- Bibiana, Y., Labaona, O., & Dhiu, M. (2025). *TOFEDU : The Future of Education Journal The Influence of Peers on Students ' Truancy Behavior*. 4(9), 5074–5080.
- Dewi, I. S., Hendracipta, N., & Syachruroji, A. (2021). *The Implementation of Student Discipline Through School Rules*. 4(2), 48–53.
- Hukum, L. (2021). *Meretas : Jurnal Ilmu Pendidikan Desember 2021 , Volume 08 Nomor 02 Meretas : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 08(32).
- Khozin, N., & Hidayatullah, W. (2024). *Pentingnya Psikologi Pendidikan Bagi Pendidik Dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan*. 3(2), 92–97.
- Linda, C. M., Shofiyani, M., & Maskhuliah, P. (2024). *Konsep Dasar Psikologi Pendidikan*. 3, 255–267.
- Nugraha, B. O., Irianto, A., Guru, P., & Dasar, S. (2024). *Peran Lingkungan Sekolah*

*dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Kelas IV. 8(November 2023), 34413–34419.*

Riset, J., Jahro, F., Ajis, A., Alfarizy, R., & Herianto, V. (2024). *Lucerna : Analisis Perilaku Disiplin Siswa Berdasarkan Kepatuhan terhadap Tata Tertib di Sekolah Menengah Atas Negeri Magepanda. 4(2), 68–74.*

Sma, D., Sidoarjo, A., & Kajian, J. (2023). *Penanaman Nilai Karakter Disiplin Siswa Kelas X. 1(1).*